PROSIDING







NASIONAL SAINS TEKNOLOGI II SEMINAR 2015 DAN

Sains dan Teknologi Inovasi Humaniora,

RESEARCH and COMMUNITY SERVICE for PROSPERITY

Supported By:

KUTA, 29-30 OKTOBER 2015

Atha Jasa

AN HISTORY



untuk Pembangunan Berkelanjutan





KUTA, 29-30 OKTOBER 2015





HUMANIORA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARvi
SAMBUTAN KETUA PANITIA is
SAMBUTAN KETUA LPPM UNIVERSITAS UDAYANAx
HUMANIORA
NILAI LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM Fenty U. Puluhulawa, Nirwan Yunus
KEBIJAKAN LOKAL DAN ETNISITAS MENUJU INTEGRASI KELOMPOK ETNIS DI KABUPATEN POHUWATO Wantu Sastro
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM RESTORASI DAN KONSERVASI TERUMBU KARANG DI PEMUTERAN BALI SEBAGAI DAYA TARIK EKOWISATA I Ketut Surya Diarta, I Gede Setiawan Adi Putra
KEMAMPUAN BAHASA BALI GENERASI MUDA BALI DI UBUD GIANYAR BALI Ni Luh Nyoman Seri Malini, Luh Putu Laksminy, I Ketut Ngurah Sulibra21
INTENSITAS KAPITAL INDUSTRI DAN DINAMISME KEUNGGULAN KOMPARATIF PRODUK EKSPOR INDONESIA Ni Putu Wiwin Setyari
MODEL ESTIMASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR INTERNAL UKM DI KABUPATEN BANDUNG Rivan Sutrisno Mardha Tri Meilani
KAMUS PRIMITIVA SEMANTIK BALI-INDONESIA-INGGRIS BIDANG ADAT DAN AGAMA Dr. I Made Netra, S.S., M.Hum, Drs. I Nyoman Udayana, M.Litt., Ph.D, Dr. Drs. I wayan Suardiana, M.Hum, Drs. I Ketut Ngurah Sulibra, M.Hum., Dr. Drs. Frans I Made Brata, M.Hum
MODEL KONFIGURASI MAKNA TEKS CERITA RAKYAT TENTANG PRAKTIK-PRAKTIK BUDAYA RANAH AGAMA DAN ADAT UNTUK MEMPERKOKOH JATI DIRI MASYARAKAT BALI Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum, Dr. I Made Netra, S.S., M.Hum, Dr. Frans I Made Brata, M.Hum, Prof. Dr. I Made Suastika, S.U

KEBIJAKAN LOKAL DAN ETNISITAS MENUJU INTEGRASI KELOMPOK ETNIS DI KABUPATEN POHUWATO

Wantu Sastro¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membangun integrasi kelompok etnis melalui nilai-nilai modal sosial maupun kearifan lokal dalam rangka memelihara keharmonisan di tengah kemajemukan masyarakat Pohuhwato sehingga tercipta Bhinneka Tunggal Ika dan terpeliharanya sikap multikulturalisme masyarakat sebagai modal dasar trerbentuknya integrasi nasional dan pembangunan nasional termasuk daerah. Sehingga target khusus yang ingin dicapai adalah tidak terbangunnya persoalan pemilahan masyarakat berdasarkan golongan primordial yang cenderung menimbulkan konflik laten maupun nyata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan menelusuri dan menganalisis keharmonisan sosial dari berbagai etnis yang ada dimasyarakat dan kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrumen penelitian yang didasarkan pada data, fakta dan konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pohuwato yang sedikitnya diwarnai oleh kemajemukan sosial saling terikat satu samalain berdasarkan nilai toleransi dan kerjasama. Ikatan sosial ini sangat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang visi misinya adalah berdimensi keadilan, membuka ranah publik yang multikultural dan memelihara nilai kearifan lokal yang berdimensi pengakuan multikultural, berdimensi keadilan sosial. Sehingga disimpulkan bahwa masyarakat Pohuwato mampu menangani permasalah sosial berhubungan dengan kemajemukan dan sekaligus.

Kata Kunci:Kebijakan, Lokal Etnisitas, Integrasi, Etnis,Multikulturalisme

Pendahuluan

Berkaitan dengan fenomena pluralisme masyarakat Indonesia kehidupan masyarakat di kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo yang menunjukkan sikap pluralis dalam bentuk corak interaksi antaretnis yang ada di daerah tersebut. Komposisi penduduk dari kabupaten Pohuwato sedikitnya cenderung multietnis yaitu terdiri dari etnis Gorontalo sebagai mayoritas dan etnis minoritas lainnya seperti etnis keturunan China, Arab, Minahasa, Sangir Thalaud (Sulawesi Utara), Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok (Nusa Tenggara Barat) Bugis dan Makasar. Kelompok etnis ini memiliki latarbelakang perbedaan budaya, bahasa dan agama. Dari komposisi masyarakatnya seperti itu muncul sebuah fenomena yang sangat menarik dan tidak seperti terjadi di daerah lain dimana meskipun etnis Gorontalo sangat mayoritas dominan, tetapi etnis minoritas memiliki kesempatan yang seimbang atau sama dengan mayoritas dalam segala aspek kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Fakta kehidupan sosial masyarakat Pohuwato yang dihuni oleh masyarakat yang sedikit diwarnai oleh kemajemukan mirip dengan hasil penelitian Nasikun (1996) bahwa suatu masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dinamika integrasi nasional dari pada suatu masyarakat dengan minoritas dominan atau masyarakat majemuk dengan segmentasi.

Untuk memperkuat relasi sosial yang harmonis dam saling mengakui satu sama lain (multikultural) dalam dimensi memperkuat integrasi nasional yang didasarkan pada kebhinnekaan, maka pemerintah daerah Pohuwato mencanangkan kebijakan nilai-nilai kearifan lokal tentang kerukunan kelompok masyarakat dengan membuat landasan bersama dalam masyarakat yaitu adanya kekerabatan "Mohuyula" sekalipun berbeda ras, suku, agama, budaya dan bahasa tetapi kita tetap kerjasama atau dengan kata lain bahwa semua bersaudara. Pandangan ini dibangun sebagai sebuah kebijakan untuk menghadapi problem sosial berupa aneka ragam konflik yang muncul dari segmentasi sosial yang mereka miliki.

Metode Dan Data

Metode ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menemukan suatu fenomena yang memiliki karakter unik dalam implementasi kebijakan pemerintah lokal dalam membangun integrasi kelompok etnis.

Studi ini dilakukan pada wilayah di Indonesia

Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Gorontalo.yowan.tamu@yahoo.com

Mereka dipersatukan oleh hasrat untuk memperbaiki kehidupan baru yang lebih baik yaitu antara pendatang sebagai transmigran dan imigran dan masyarakat setempat yang menerima inspirasi yang bisa menjadi akultrasi antara semangat lokal dan semangat perubahan yang dibawah oleh para pendatang. Harapan inilah menjadi simbol untuk bersatu yang didasari oleh rasa saling menghormati atas nilai-nilai yang berbeda untuk mencapai integrasi atau kesatuan kelompok-kelompok etnis. Nilai persatuan ini dapat ditelusuri antara lain dalam kehidupan beragama berupa toleransi yang sangat harmonis, sosial, ekonomi seperti yang dinyatakan oleh Ustad Alimudin (Pesantren) yang menyatakan bahwa:

Masyarakat Pohuwato terdiri dari berbagai macam etnis, budaya dan agama, akan tetapi selama ini masyarakat selalu hidup rukun dan damai, sehingga tidak ada konflik yang berhubungan dengan sara, disisi lain tingkat kriminalitas di daerah ini sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Setiap permasalahan yang terjadi langsung disikapi oleh pemerintah melalui koordinasi dari semua tokoh dan pemuka adat serta agama. Hal ini dibuktilkan dengan siswa-siswa di Madrasah ada juga dari golongan etnis Bali yang beragama Hindu. Sehingga pengelola Pesantren menyesuaikan kurikulum pendidikan agama. Untuk agama Hindu ada guru dari agama Hindu yang dikontrak sebagai guru agama Hindu di Madrasah tersebut (Wawancara, tanggal4 April 2015).

Berdasarkan pandangan bahwa kondisi masyarakat Pohuwato yang terikat satu sama lain, maka dalam pandangan ini mungkin yang paling tepat mengutip argumentasi dari Charles Taylor (1991) tentang teori keragaman dimana dikatakan bahwa didalam keragaman yang luas kita harus mengakomodasi bukan saja beragam kelompok budaya, melainkan juga beragam cara dimana para anggota kelompok itu menjadi bagian dari pemerintah negara yang lebih besar. Pemikiran Taylor sangat tepat melihat kemunculan keragaman etnis di kabupaten Pohuwato sebagai awal dari proses kebijakan pemerintah pusat untuk menempatkan para transmigran dari daerah-daerah Indonesia yang notabene adalam masyarakat yang berbeda etnis dengan penduduk setempat dimana mereka ditempatkan di daerah baru.

Bila menyandingkan fakta dimasyarakat Pohuwato dan teorisasi tentang multikulturalisme, maka paling tepat meminjam kembali argumentasi. Charles Taylor (1991) yang menyatakan bahwa secara terbuka bahwa warga mungkin merasa bergairah dan menjadi objek kebangggaan untuk bekerja bersama guna membangun suatu masyarakat yang dilandassi oleh keragaman yang sangat luas dan dngan demikian bersedia berkorban agar masyarakat itu bersatu. Kesetiaan adalah produk dari solidaritas bersama. Apabila warga memiliki rasa identitas yang kuat terhadap etnis lain, maka mereka akan melihat prospek untuk mempertahankan keragaman yang sangat luas sebagai sesuatu yang memberikan inspirasi dan menyenangkan.

5.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Untuk Menata Secara Adil Kelompok Masyarakat Dalam Perspektif Multikulturalisme

Masalah tentang kebijakan pemerintah daerah dalam menangani penataan kemajemukan masyarakat di Pohuwato membutuhkan waktu yang begitu panjang, bahkan dapat dikatakan sepanjang umur dari perkembangan masyarakat yang majemuk yang ada di daerah ini. Kebijakan tersebut tentu berkaitan dengan bagaimana sebuah kemajemukan etnis adalah sesuatu yang harus dipahami dan dimengerti dan ancaman terhadap kohesi masyarakat maupun integrasi nasional maupun di tingkat lokal tersebut harus ditangani secara mendalam untuk menciptakan ketertiban di antara kelopok-kelompok etnis secara adil.

Kebijakan pemerintah Pohuwato dalam menangani persoalan masalah kemajemukan masyarakatnya sesungguhnya sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjalankan sebuah administrasi publik dalam bentuk kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Esman (1999)) dan Effendi (2010) menekankan bahwa sebuah *policy* yang merupakan bagian dari administrasi publik seharusnya dalam merumuskan kebijakan perlu memperhatikan kemajemukan etnis yang ada dalam masyarakat. Berkaitan dengan argumentasi ini tentu saja kebijakan pemerintah daerah dalam menata kehidupan masyarakat Pohuwato sesungguhnya tidak terlepas dari kebijakan secara umum dari pemerintah pusat dalam menangangi segala sesuatu yang berkaitan kepentingan masyarakat umum. Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah distribusi keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui proses transmigrasi

penduduk yang kebijakannya tidak hanya meningkatkan tarap hidup masyarakat tetapi juga adalah upaya pemerintah Pohuwato untuk membangun kebhinnekaan antar kelompok masyarakat supaya mengenal satu sama lain yang berbeda latar belakang baik dari aspek suku/etnis, agama, budaya dan karakter.

5.2.1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Melalui Visi Dan Misi Berdimensi keadilan Masyarakat

Kebijakan melalui visi misi, yang dijadikan arah strategi menata masyarakat Pohuwato yang salah satunya adalah membuat kebijakan pembangunan yang berdimensi keadilan masyarakat dan mengayomi pluralism masyarakat seperti digambarkan pada uraian di atas. Gambaran visi pemerintah Pohuwato yakni "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pohuwato di atas nilai spiritual melalui pe,bangunan sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan". Sementara misinya yang sangat bersentuhan dengan masalah pluralisme dan multikulturalisme di daerah ini yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Pohuwato yang antara lain misi tentang" Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralism dan kesetaraan gender. Selain itu menegakkan supermasi dan tata pelayanan publik yang lebih berkeadilan dan rasa aman bagi masyarakat". Di samping kebijakan yang dirumuskan melalui visi misi di atas, kebijakan lainnya yang bersifat affirmative action dan sangat bersentuhan dengan hubungan antar etnis adalah melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat (lintas agama), membinan hidup rukun dan kerjasama umat beragama.

Implentasi kebijakan pemerintah Pohuwato dengan masyarakatnya, sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang sejalan dengan pemerintah yang paling dikenal untuk menangani masalah masyarakat daerah adalah melalui desentralisasi atau pemberian otonomi daerah diformulasikan dalam ruang lingkup yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara politik kebiijakan desentralisasi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten Pohuwato setidaknya dipahami dalam konteks membuka ruang bagi lahirnya demokratisasi di tingkat lokal, yang sangat responsif terhadap pelayanan dan mengayomi kepentingan masyarakat yang terdiri dari berbagai latarbelakang sosial, serta memelihara proses mekanisme transparansi kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan pada publik.

5.2.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Mendekatkan Diri Dengan Ranah Publik Deliberatif Yang Multikultural

Kebijakan ini pemerintah daerah diupayakan untuk menempatkan partispasi masyarakat secara langsung dan deliberative dalam ranah menciptakan demokrasi di tingkat lokal. Artinya kebijakan pemerintah Pohuwato dalam menangani masyarakat yang berhubungan penataan kemajemukan sosial sepatutnya menggunakan ruang publik deliberative agar supaya terjadi harmonisasi yang kondusif antara publik (masyarakat) dengan pemerintah. Karena itu ada beberapa kebijakan pemerintah daerahnya yang ditempuh antara lain kebijakan melalui Badan Kesbangpol selalu memantau perkembangan yang terjadi dimasyarakat termasuk berbagai potensi-potensi konflik yakni: (1). Memperkuat kerjasama antar umat beragama; (2). Mendorong untuk melakukan dialog dengan semua agama yang hamper setiap tahun dilakukan; (3). Membinan kerukunan hidup; (4). Pemerintahan daerah membuka dalam hal kesempatan yang sama bagi semua tanpa membeda-bedakan latarbelakang; (5). Membuka ruang publik melalui rumah panua yang tujuannya untuk menerima sgala masukan dan keluhan masyarakat, termasuk hubungan dalam masalah pluralisme.

Untuk itu untuk menata keharmonisan maupun kohesi antar etnis dimasyarakat Pohuwato tidak hanya dari diri kelompok masyarakat yang berbeda-beda tersebut, tetapi juga sangat tergantung pada pola kebijakan pemerintah daerah kabupaten Pohuwato. Kebijakan pemerintah daerah sangat jelas misalnya semakin giatnya pemerintah daerah membangun modal sosial seperti "huyula" (kerjasama), maupun idioms "torang basudara" (kita semua besaudara). Juga pola aksi pemerintah antara lain untuk turun langsung pada setiap kegiatan kemasyarakat yang menghadirkan berbagai etnis di dalamnya dan pola bantuan untuk kelompok etnis.

Dengan demikian praktek kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah ini selalu berpodoman pada keempat pilar bangsa di atas yang merupakan kekuatan yang fundamental yang membawa keterbukaan dan euphoria demokrasi lokal telah mendorong bagi daerah maupun masyarakatnya untuk lahir sebagai kabupaten baru yang otonom dan hidup dan berkembang dalam membangun daerahnya di tengah-tengah kekayaan mosaik etnis, agama dan karakter budaya yang berbeda-beda dalam sebuah bingkai entitas kemajemukan yang harmonis dan saling memelihara toleransi satu sama lain.

5.2.3. Kebijakan Dalam Memelihara Nilai Modal Sosial Dan Kearifan Lokal Menuju Pengakuan Multikulturalisme

Pemerintah daerah sangat memperhatikan komposisi masyarakat setempat dengan cara mengadopsi mereka dalam struktur atau institusi pemerintah dengan cara mengakomodasi mereka. Dengan melihat kondisi masyarakat Banuroja yang multietnis, maka terdapat nilai yang terkadung secara hakiki melalui modal sosial maupun kearifan lokal yang sudah lama terbangun dalam masyarakat lokal. Nilai tersebut merupakan konsepsi yang dijadikan sebagai pandangan hidup bersama antara kelompok-kelompokyang berbeda tersebut yang sangat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam menata keragaman masyarakat Pohuwato yaitu: (1). Nilai kekerabatan mohuyula; (2). Ideologi *torang basudara* (kita bersaudara); (3). Toleransi; (4). Kesetaraan; (4). Musyawarah; (5). Komitmen hidup berdampingan secara damai.

Kelima nilai indikator yang dianggap sebagai patron dalam melakukan interaksi sosial dimasyarakat tersebut telah membuat masyarakat Pohuwato, khususnya masyarakat Banuroja terintegrasi sosial dengan baik, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan gesekan yang menyebabkan potensi konflik muncul. Karenanya nilai-nilai modal sosial yang ada dalam masyarakat mengalami pembauran antara nilai lokal setempat dan nilai lokal yang lebih universal, ketika kedatangan pata pendatang baru di daerah ini dengan misalnya melahirkan somboyan bersama a torang basudara (kita semua bersaudara) dan masyarakat dan daerah Rukun, Damai Dan Indah, Citra Budaya.

Kesimpulan

Kelompok etnis di wilayah itu terikat untuk bersatu oleh hasrat untuk memperbaiki kehidupan baru yang lebih baik yaitu antara pendatang sebagai transmigran dan imigran dan masyarakat setempat yang menerima inspirasi yang bisa menjadi akultrasi antara semangat lokal dan semangat perubahan yang dibawah oleh para pendatang. Keinginan ini menjadi simbol untuk bersatu yang didasari oleh rasa saling menghormati atas nilai-nilai yang berbeda untuk mencapai integrasi atau kesatuan kelompok-kelompok etnis. Kebiajakn pemerintah di tingkat lokal secara empiris dapat membangkitkan sebuah kesadaran baru bagi masyarakat yang bersifat sukarela dan kerjasama yang toleran, harmonis, rukun dan damai yang sebagai model dalam menata kemajemukan di tingkat lokal yang masyarakatnya sangat pluralistis.

TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Sofian, 2010, Reformasi Tata Kepemerintahan, menyiapkan Aparatur Negara Untuk mendukung Demokratisasi Politik Dan Ekonomi Terbuka, Yogyakarta, Gadjah mada University Press Esman, Milton, J, 1999, Ethnic Politic and Economic Power, Comparative Politics, No.19, 345-418 Miles dan Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, Jakarta, UI Press

Nasikun, 1996, Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Majemuk, dalam Ariel Heryanto, Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Taylor, Charles, 1991, Shared and Divergent Values, in Roland Watts and D, Brown (eds), Options for a New Canada, University of Toronto Press, Toronto

yaitu kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerahnya tidak hanya mermbangun kesejahteraan masyarakat, namun juga sangat memperhatikan dimensi kemajemukan etnis dengan membangun nilai-nilai kearifan local dalam rangka untuk memelihara integrasi yang dapat menciptakan keharmonisan dan sikap multikulturalisme dimasyarakat daerah. Fokus kajian dilakukan untuk melihat pola hubungan antaretnis di kabupaten Pohuwato bisa terikat satu sama lain dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Pohuwato dalam menata secara adil kelompok masyarakat dalam perspektif multikulturalisme untuk menghadapi ragam konflik yang muncul dari segmentasi sosial.

Data

Datadikumpulkan secara integrativedengan melihat data-data yang relevan dan sempurna dari berbagai sumber yaitu

Pertama, sumber data utama dari di wilayah kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo dengan melakukan pengamatan maupun observasi dan menanyakan sebanyak mungkin sumber-sumber yang dianggap berkompeten dalam menjawab fenomena sosial tersebut yang berkaitan dengan kebhinnkeaan antraetnis dan apa saja yang mengikat kebhinnekaan kelompok etnis tersebut. Wawancara mendalam(In Depth-Interview), dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris) yang berkaitan dengan pemahaman tentang: kebijakan pemerintah daerah dalam membangun kehinnekaan antaretnis di kabupaten Pohuwato dalam perspektif multikulturalisme, penataan kerukunan kelompok masyarakat antar etnis melalui kekerabatan mohuyula, intensitas memelihara ideologi torang basudara (kita semua bersaudara).

Setelah itu wawancara mendalam(In Depth-Interview), dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris) yang berkaitan dengan pemahaman tentang: kebijakan pemerintah daerah dalam membangun kbhinnekaan antaretnis di kabupaten Pohuwato dalam perspektif multikulturalisme.

Kedua, Sumber data juga diperoleh melalui data dokumen yang tersedia baik dari pemerintah daerah, masyarakat. media, kepustakaan, workshop dan sebagainya yang dianggap sebagai sumber data pelengkap.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisa data dengan menggunakan analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan HASIL PENELITIAN

Pola Hubungan Antaretnis Di Kabupaten Pohuwato Yang Terikat Satu Sama Lain

Doktrin klasik yang paling banyak dipakai oleh pemerintah dan masyarakat majemuk dibanyak negara di dunia termasuk di tingkat lokal adalah bagaimana memelihara nilai persatuan yang dibalut oleh saling mengakui keberagaman sosial dan menolak pemisahan atau garis damarkasi atau kelompok-kelompok etnis yang didasarkan pada rasa kebencian dan diskriminasi. Karena doktrin klasik mengajarkan bahwa cara yang paling ampuh untuk menstabilkan wilayah yang multietnis antara lain bagaimana membangun keharmonisan yang kohesif yang dilandasi oleh nilai-nilai bersama untuk mencapai hidup yang lebih baik.

Konsepsi dari nilai empiris maupun teoritis ini dapat dialaborasi pada kasus masyarakat di kabupaten Pohuwato yang memiliki nilai persamaan di atas dasar pondasi perbedaan etnis maupun agama yang sesungguhnya mereka memiliki keinginan yang sama dengan prinsip yang kuat untuk tetap bersatu antara kelompok pendatang sebagai etnis minoritas dan masyarakat Gorontalo sebagai etnis mayoritas. Kehidupan masyarakat bersama yang dibangun dimasyarakat Pohuwato tersebut tidak lain karena, masing-masing etnis memiliki kesadaran yang tinggi bahwa mereka adalah para pendatang yang ingin mengadu nasib bukan masyarakat asli yang sebelumnya daerah ini adalah penduduknya masyarakat Gorontalo, sehingga terjalinya kerjasama diantara kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai cirri etnis. Selain itu diantara mereka terdapat tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membina persatuan.